



BADAN SIBER DAN  
SANDI NEGARA

# URGENSI REGULASI KEAMANAN SIBER

Rabu, 24 Februari 2021





# FERRY INDRAWAN

KOORDINATOR FUNGSIONAL  
BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA  
BIRO HUKUM DAN HUMAS  
SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



NAMA : FERRY INDRAWAN  
TMPT/TGL LAHIR : CIMAHI/16 FEBRUARI 1974  
JABATAN : KOORDINATOR  
FUNGSIONAL : HUKUM DAN KERJASAMA  
HUMAS : BIRO HUKUM DAN  
BSSN : SEKRETARIAT UTAMA,  
PENDIDIKAN : AKADEMI SANDI NEGARA

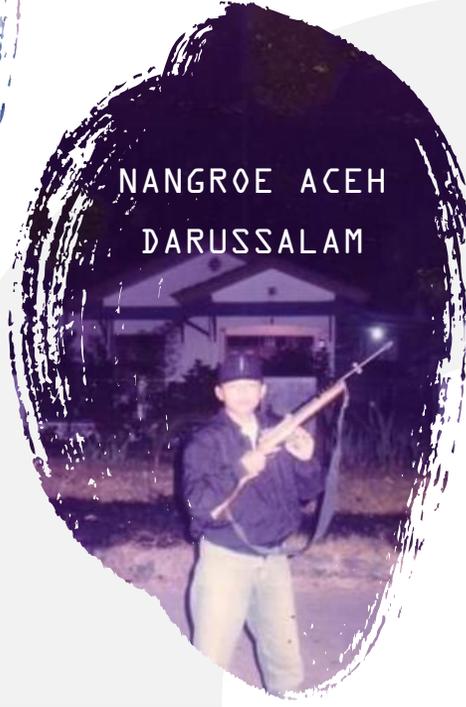
PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA SANDI NEGARA DAN BSSN :

- ❖ SEKSI EMISI DIREKTORAT PAMKOMLEK
- ❖ SEKSI MONITORING OBSERVASI DIREKTORAT PAMKOMLEK
- ❖ SEKSI ANALISIS SISTEM SANDI DEPUTI II
- ❖ SEKSI KAMAR SANDI DEPUTI II
- ❖ SUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- ❖ SUBBAG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI HUKUM
- ❖ KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- ❖ KABAG HUKUM DAN KERJASAMA
- ❖ KOORDINATOR HUKUM DAN KERJASAMA

# KEDINASAN DI LUAR LEMSANEG/BSSN



TIMOR TIMUR



NANGROE ACEH  
DARUSSALAM

PENGALAMAN BEKERJA DI LUAR LEMBAGA SANDI  
NEGARA / BSSN

- ✧ ANGGOTA P3TT POLKAM DILI TIMOR TIMUR
- ✧ ANGGOTA POLKAM REKONSILIASI RI-TIMOR LESTE.
- ✧ ANGGOTA KAMAR SANDI POLKAM
- ✧ KA TIM KASA TIM AJU NANGROE ACEH DARUSSALAM.
- ✧ ANGGOTA TIM MONITORING TERBATAS PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM.
- ✧ KA TIM DESK ACEH KEMENKO POLHUKKAM
- ✧ PUSAT KOMUNIKASI DEPARTEMEN LUAR NEGRI
- ✧ KONSULAT JENDERAL RI UNTUK DAVAO CITY PHILIPPINES
- ✧ ANGGOTA DESK CYBER KEMENKO POLHUKKAM



ISTRI VERA PATRICIA  
ANAK PERTAMA CASIMIRA ALIFIA  
INDRAWAN  
ANAK KEDUA KAYLA DAFINA  
INDRAWAN

KELUARGA



## PERPRES 53 dan 133 TAHUN 2017

Presiden Republik Indonesia pada 19 Mei 2017 menandatangani Perpres Nomor 53 tahun 2017 tentang BSSN yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017 tentang BSSN pada 16 Desember 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BSSN bukan merupakan lembaga baru, namun merupakan penguatan dari lembaga yang telah ada sebelumnya, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC)*.

Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian di Lembaga Sandi Negara serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh BSSN.



### UU Nomor 11/2008 dan UU Nomor 19/2016 ttg ITE

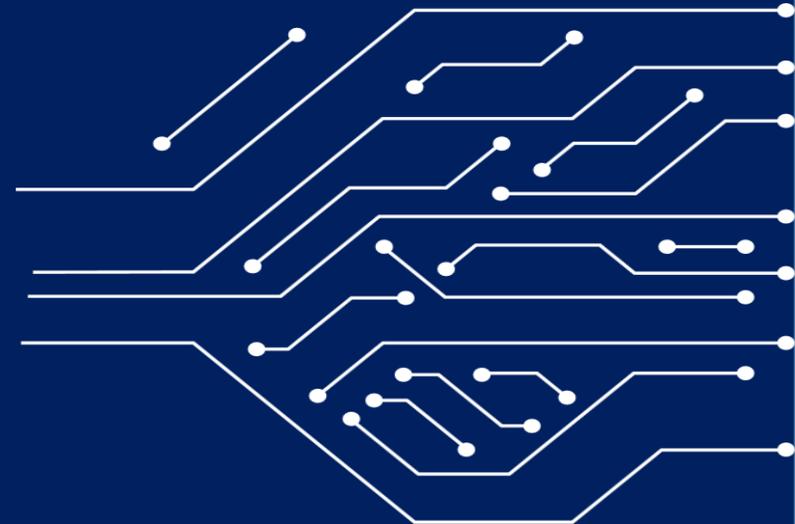
Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Perpres Nomor 95/2018 ttg SPBE

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

### PP Nomor 71 Tahun 2019 ttg PSTE

Peran Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan, mencegah penyebaran Informasi/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan dilarang, dan menetapkan instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.



# Tantangan Penerapan Hukum Siber



## PENGUATAN PONDASI

- 1  
Kerentanan yg menimbulkan  
bahaya/ancaman harus  
dideteksi/diidentifikasi
- 3  
Serangan harus dapat  
ditanggulangi, dan kerusakan/  
kehilangan/kehancuran harus  
dapat dipulihkan

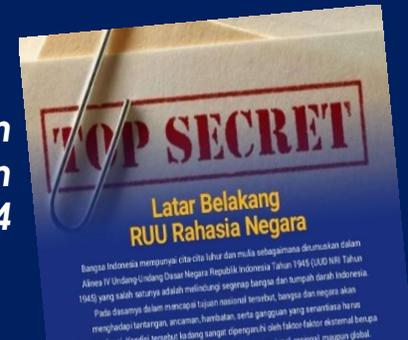


- 2  
Aset penting untuk hajat hidup  
orang banyak harus dilindungi  
dari sabotase, serangan, dll
- 4  
Segala komponen penyelenggara  
Keamanan Siber harus diketahui  
keberadaannya



DPR periode sebelumnya mengajukan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (2019)

BSSN mengusulkan RUU Persandian dan RUU Rahasia Negara dalam Prolegnas 2020-2024



## PROGRESS RUU RAHASIA NEGARA



1994-2008

- Kajian dan penyusunan

2008-2009

- Pembahasan di DPR

September 2009

- Penarikan oleh Presiden dari pembahasan di DPR

2009-2014

- Kembali dimasukkan dalam Prolegnas 2009-2014

2016

- Penyelarasan Naskah Akademik

2019

- Proses Pengusulan RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dan menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2020

## PROGRESS RUU PERSANDIAN



2012

- Kajian dan Penelitian Hukum

2013

- Penyusunan Naskah Akademik
- Penyiapan draf RUU

2014

- Konsultasi Pakar dan FGD dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
- Draft RUU dirumuskan

2015

- Pembahasan DIM RUU internal Lemsaneg dan lembaga pemerintah terkait

2016

- Pembahasan RUU dalam PAK (Panitia Antar Kementerian)
- Penyelarasan Naskah Akademik RUU

2017

- Pembahasan RUU dalam PAK (Panitia Antar Kementerian)

2018

- Harmonisasi RUU oleh Kementerian Hukum dan HAM

2019

- Proses Pengusulan RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dan menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2020

# Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

**UU ITE**



**Tanda Tangan Elektronik**  
adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.



**Sertifikat Elektronik** adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

# Aspek Hukum Sertifikat Elektronik



Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE)  
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE 11/2008)



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019  
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

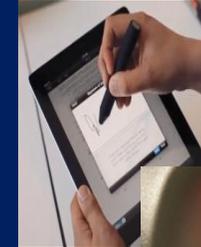
**“Dokumen yang telah  
ditandatangani secara elektronik”  
berlaku dan sah dimata hukum**





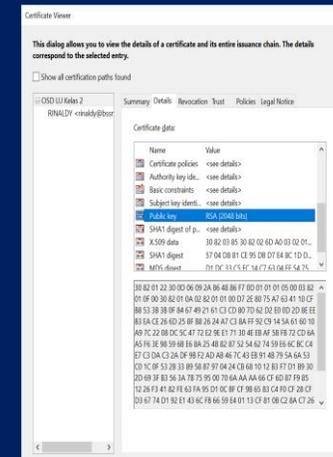
TTE yang tidak tersertifikasi :

- Tanda tangan yang di-scan
- Tanda tangan yang diinputkan ke alat elektronik
- Representasi digital dari biometrik (retina, sidik jari)
- Karakter unik (pin, password)



TTE yang tersertifikasi :

- **Tanda tangan digital** dengan kriptografi





# VIDEO BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK - BSSN





BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

# TERIMA KASIH

